

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA LEBBA'E KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE

Andi Desi, Andi Aslinda, Risma Niswaty

Universitas Negeri Makassar
Email : Andidesi4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Lebba'e Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data. Teknik analisis data yang digunakan terdiri atas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Lebba'e Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone belum di implementasikan secara maksimal. Di lihat dari 1) isi kebijakan a) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi belum memberikan pengaruh yang signifikan dan baik; b) tipe manfaat belum terealisasi secara menyeluruh; c) derajat perubahan yang ingin dicapai belum sepenuhnya terpenuhi dan tidak merata baik dari segi pembangunan dan hal lain; d) letak pengambilan keputusan yang diambil oleh pimpinan desa sudah baik tapi para pelaksana implementasi tidak menjalankan dengan baik; e) pelaksana program tidak mengimplementasikan kebijakan yang dari atasan dengan optimal; f) sumber-sumber daya yang digunakan masih kurang dan perlu dibenahi 2) Lingkungan kebijakan a) kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat menjalankan kebijakan dengan menjalin komunikasi yang baik; b) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dengan menggunakan sistem kekeluargaan yang memiliki nilai positif dan negatif; c) tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana belum berjalan secara maksimal dan masih kurang patuh terhadap keputusan yang dibuat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Anggaran.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia di zaman orde baru menganut asas sentralisasi yaitu semua pembangunan dan wewenang pemerintah terjadi pada tingkat pusat, dengan demikian urusan pemerintahan dan pembangunan di zaman orde baru tersebut terjadi pada tingkat pusat atau ibu kota negara, tetapi seiring berjalannya waktu dan runtuhnya rezim orde baru yang di pimpin oleh presiden Soeharto, Negara Republik Indonesia sudah perlahan mulai meninggalkan sistem sentralisasi tersebut, dan Pada tanggal 1 januari 2001 yang lalu pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan di mulainya pelaksanaan otonomi daerah.

Sejak mulai saat itu pemerintah dan daerah di seluruh nusantara telah memasuki babak baru yaitu *otonomi daerah* dan *desentralisasi fiskal*.¹ Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut maka sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang menganut asa sentralisasi dengan pemerintahan pusat secara resmi di tinggalkan.

Penerapan otonomi daerah memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan dan pembangunan yang mendorong keterlibatan masyarakat lebih luas. Sedangkan pada tatanan pemerintahan, perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis (*good governance*). Sedangkan pada tatanan kemasyarakatan harus dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan kebijakan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan cerminan yang memberikan suatu dasar yang berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dan memberikan suatu pengakuan atas otonomi asli pada desa. Desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret ditunjukkan dengan keragaman yang tinggi serta adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda dan relatif mandiri. Dengan adanya otonomi desa pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. pemerintah pusat dan daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan /pembelajaran termasuk peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) setiap tahun dengan peraturan desa, dan disusun untuk mengetahui seberapa besar pendapatan dan belanja desa itu untuk kemajuan dan pembangunan desa

serta pengeluaran desa itu sendiri.

Pada prinsip penjelasan diatas, jelaslah otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pembangunan masyarakat ditingkat paling bawah yaitu desa untuk pemerataan pembangunan, dan membuka peluang untuk memperbaiki kegiatan ekonomi di masyarakat tak terkecuali pada tingkat desa. Merujuk pada kondisi sekarang ini, pelaksanaan otonomi daerah terutama pada tingkat desa masih jauh dari harapan, masih banyak penyimpangan yang terjadi di berbagai bidang, salah satunya implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang pada penerapannya sering ditemukan banyak masalah, yaitu tidak adanya ditemukan usaha desa seperti usaha ternak, menjahit, budidaya tanaman hias, serta usaha yang memanfaatkan potensi penduduk desa lainnya, kurang baiknya pengelolaan kekayaan desa, kurang peningkatannya kondisi sumber daya manusia serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kurang maksimal.

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut berhubungan satu sama lain. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan maka penelitian ini menggunakan model implementasi *Merilee S. Grindle* sebagai acuan dan dasar dalam perbandingan apakah implementasi kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lebba'e Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015. model implementasi kebijakan *Merilee S. Grindle* dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan dan data dilapangan disusun peneliti di lokasi dan peneliti mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam Peneliti melakukan analisis data dan memperkaya informasi dan membandingkan dengan data aslinya dan disajikan dalam bentuk uraian naratif, berupa cerita responden dari hasil wawancara dan latar sosial mengenai implementasi kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lebba'e Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Data Hasil Penelitian

Berdasarkan peraturan mengenai implementasi kebijakan anggaran

pendapatan dan belanja desa dikabupaten bone diatur dalam peraturan bupati bone no 15 tahun 2015 pada pasal 12 ayat 1 tentang klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas kelompok

- a. Penyelenggaraan pemerintah Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja tak terduga

Tahun 2015 pendapatan Desa Lebba'e senilai total Rp. 479.779.600,00. dan belanja Desa Lebba'e total 479.879.600,00 dengan surplus/defisit Rp.100.000 dibagi menjadi penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp 170.779.600,00. bidang pembangunan desa senilai Rp 292.600.000,00. bidang pembinaan masyarakat Rp 3.000.000,00, bidang pemberdayaan masyarakat 13.500.000. Sedangkan untuk pendapatan Desa Lebba'e berasal dari dana desa senilai 94.519.900,00. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten senilai Rp 19.440.900. Alokasi dana desa Rp. 315.718.800,00. Bantuan keuangan Rp. 50.000.000. dan bantuan keuangan kabupaten senilai Rp. 50.000.000 dan pendapatan lain-lain Rp.100.000,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 sumber pendapatan Desa Lebba'e berasal dari Dana Desa, pajak dan retribusi daerah kabupaten serta Alokasi dana desa, bantuan keuangan, bantuan keuangan kabupaten dan pendapatan lain-lain.

Tahun 2016 pendapatan Desa Lebba'e senilai total Rp. 966.743.000,00 dan belanja desa juga senilai Rp. 966.743.000,00 dibagi menjadi bidang penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp 302.071.000,00. Bidang pembangunan desa 561.061.000,00. bidang pembinaan masyarakat Rp. 46.611.000,00. bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 10.000.000. dan surplus/defisit Rp. 47.000.000. sedangkan untuk pendapatan Desa Lebba'e berasal dari Dana Desa Rp. 598.061.000,00. Bagian dari pajak dan retribusi daerah kabupaten senilai Rp. 18.411.000,00. Alokasi dana desa 350.271.000,00.²⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 sumber pendapatan Desa Lebba'e berasal dari dana desa, pajak dan retribusi daerah kabupaten serta alokasi dana desa. Proses implementasi kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lebba'e Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone berdasarkan hasil wawancara dan data serta pengamatan peneliti proses implementasi pengelolaan di menjadi 4 bagian yaitu :Penyelenggaraan pemerintah Desa, seperti intensif kepala desa, dusun, iman guru mengaji dan intensif posyandu, serta gaji pegawai negeri sipil. Pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, kantor desa beserta inventaris didalam untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan jalan tani dan irigasi sawah untuk memudahkan petani mengakses jalan ke area sawah mereka, serta dibidang kesehatan pembangunan MCK dan tempat sampah. Pembinaan kemasyarakatan Desa yaitu sosialisasi tentang kejahatan, bahaya narkoba, dan penyuluhan tentang

hukum. Pemberdayaan masyarakat desa seperti melakukan pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan.

2. Pembahasan

Implementasi kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lebba'e kecamatan ajangale kabupaten bone yaitu proses implementasi dengan membagi menjadi 4 bagian yaitu Penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sumber anggaran pendapatan di Desa Lebba'e berasal dari Dana Desa, pajak dan retribusi daerah kabupaten serta alokasi dana desa, bantuan keuangan, bantuan keuangan kabupaten dan pendapatan lain-lain

Proses implementasi kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lebba'e Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Kabupaten Bone. tetapi pada pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut tidak secara penuh terlaksana atau bisa dikatakan tidak terlaksana secara efektif. itu disebabkan oleh beberapa faktor sesuai dengan teori *Merilee S. Grindle* yaitu, pelaksana program yang masih kurang patuh sehingga program hanya dibuat sekedar program tidak terimplementasi dengan baik, sumber daya yang digunakan masih kurang, baik dari keilmuan maupun pengetahuan teknologi dan etos kerja, dan tingkat kepatuhan pada tingkat kepatuhan masih kurang dari perangkat desa, dan respon dari pelaksana yang masih kurang terutama respon dari masyarakat yang menerima kebijakan tersebut yang masih sangat kurang.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak terlepas dari perangkat pemerintah setempat dan juga dari masyarakat sebagai penerima kebijakan tersebut. Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengawasi perilaku manusia. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan tidak efektif, sesuai dengan teori *Merilee. S. Grindle*.

A. *Content of policy (Isi Kebijakan)*

a. *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Implementasi pengelolaan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lebba'e dilihat dari kepentingan yang mempengaruhi masih belum memberikan pengaruh secara signifikan dan baik, masalah dilihat dari kepentingan yang mempengaruhi tidak secara total dan aktif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lebba'e, keterlibatan kepentingan tersebut hanya sebatas formalitas saja.

b. *Type Of Benefits* (tipe manfaat)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti tipe manfaat kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lebba'e adalah pada bidang pembangunan desa, terutama pada bidang pertanian, adalah pembangunan jalan tani dan irigasi sawah yang sangat membantu para

petani, pembangunan kantor desa dan kelengkapan inventaris desa lainnya yang berguna untuk mempermudah pelayanan, pengadaan MCK dan juga pengadaan tempat sampah di bidang kesehatan. Tetapi pada pembangunan jalan poros di biayai oleh anggaran Provinsi.

Tetapi di lapangan masih banyak lahan pertanian warga yang tidak memiliki irigasi, serta juga lahan pertanian tidak memiliki jalan tani, dan di Desa Lebba'e ini tidak memiliki posyandu dan juga puskesmas yang ada jauh dari kata layak untuk dikatakan sebagai puskesmas. Serta poskamling yang masih kurang layak untuk difungsikan

c. *Extent of change envision* (Derajat Perubahan yang Ingin di capai)

Dari hasil wawancara peneliti dikatakan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Lebba'e bahwa derajat perubahan dicapai adalah yang dulu Desa Lebba'e tidak memiliki kantor desa, sekarang dengan adanya peraturan bupati ini tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, di Desa Lebba'e sudah memiliki kantor desa, serta aset-aset desa yang ada didalamnya.

Pada kenyataannya derajat perubahan ini belum secara optimal terpenuhi salah satu contohnya adalah data desa yang sama sekali tidak terealisasi. juga pembentukan BUMDES yang tidak terimplementasikan sampai sekarang, juga infrastruktur desa yang penulis amati belum sepenuhnya terpenuhi atau lengkap.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Letak pengambilan keputusan pada implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lebba'e berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh para *stakeholder*, koordinasi dari kepala desa kepada bawahannya. Letak pengambilan keputusan tidak lepas dari peran dari kepala desa lebba'e yang berkoordinasi dengan bawahannya dalam menyusun menetapkan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lebba'e.

e. *Program Implementer* (pelaksana program)

Pelaksana program dan program pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di desa lebba'e sudah terprogram dan terstruktur dengan baik, yaitu program pelaksanaan pemerintah desa, program pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan, Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah pada saat pengimplementasiannya para pelaksana program tersebut masih kurang dan bahkan hanya sekedar program saja secara formal tidak terimplementasi kepada masyarakat sama sekali.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Teori *Merilee S. Grindle* menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang digunakan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.²⁸ Dalam pengelolaan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lebba'e sumber daya yang digunakan dari segi keilmuan ada tamatan SMA dan S1. berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari peneliti bahwa salah satu penghambat tidak terimplementasikan dengan baik kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan

dan belanja desa di desa Lebba'e, adalah dari segi kemampuan sumber daya manusia, baik dari segi keilmuan, tingkat penguasaan teknologi yang masih kurang dan juga etos dan semangat kerja sangat kurang, sehingga kedepannya pemerintah desa setempat harus mampu memperbaiki dari segi sumber daya manusia sendiri.

B. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)

a. *Power, interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)

Strategi yang digunakan dalam mengelola kebijakan anggaran dan pendapatan belanja desa ini adalah menjalin komunikasi dari semua perangkat desa yang terlibat, baik itu masyarakat yang juga sebagai pelaksana dan penerima kebijakan tersebut. pengamatan peneliti, strategi yang digunakan pemerintah desa lebba'e dengan menjalin komunikasi yang intens kepada setiap perangkat desa dan yang, mendukung implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sangat bagus, tetapi seperti yang dikatakan ketua BPD desa lebba'e yang menjadi kendala adalah masyarakat yang kurang rasa ingin tahunya dan bermasa bodoh.

b. *Intitution and regime characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Karakteristik pemerintah desa lebba'e dalam mengelola kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah dengan memilih perangkat atau pembuat program kebijakan berdasarkan sistem kekeluargaan, dari sisi positifnya adalah komunikasi dan kebijakan didukung dengan baik. Tetapi memiliki sisi negatif yaitu terkadang perangkat desa yang dipilih tidak patuh dengan peraturan tersebut karena perangkat dan pejabat desa mempunyai hubungan keluarga rasa segan dan patuh akan melaksanakan kebijakan itu masih kurang.

c. *Compliance and Responsivense* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Dalam teori *Merilee S. Grindle* hal lain yang penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, ²⁹dalam implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lebba'e ini tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana masih kurang, terbukti dengan kepatuhan dari pelaksana yang kurang adalah laporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa lebba'e dalam 2 tahun terakhir belum di serahkan kepada ketua BPD, dan juga respon dari masyarakat yang diharapkan kritis serta mau berpartisipasi dalam program pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lebba'e yaitu BUMDES yang di betuk tahun lalu sampai sekarang belum berjalan.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan

Belanja Desa (APBDesa) di Desa Lebba'e Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone belum di implementasikan secara maksimal. Di lihat dari 1) isi kebijakan a) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi belum memberikan pengaruh yang signifikan dan baik; b) tipe manfaat belum terealisasi secara menyeluruh; c) derajat perubahan yang ingin dicapai belum sepenuhnya terpenuhi dan tidak merata baik dari segi pembangunan dan hal lain; d) letak pengambilan keputusan yang diambil oleh pimpinan desa sudah baik tapi para pelaksana implementasi tidak menjalankan dengan baik; e) pelaksana program tidak mengimplementasikan kebijakan yang dari atasan dengan optimal; f) sumber- sumber daya yang digunakan masih kurang dan perlu dibenahi 2) Lingkungan kebijakan a) kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat menjalankan kebijakan dengan menjalin komunikasi yang baik; b) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dengan menggunakan sistem kekeluargaan yang memiliki nilai positif dan negatif; c) tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana belum berjalan secara maksimal dan masih kurang patuh terhadap keputusan yang dibuat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Cetakan ke-5. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anonim.2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*.Universitas Negeri Makassar.
- Kumorotomo, Wahyudi.2014.*Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam.2014.*Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian teori konsep dan pengembangannya*. Cetakan ke-7. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Cetakan ke-7. Bandung: CV, Alfabeta
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solichin Abdul Wahab, Haji.2016. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Cetakan ke- 4. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono.2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-23. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tahir, Arifin.2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan ke-2. Bandung: CV. Alfabeta.

Wijaya, HAW.2014. *Otonommi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pers.

Haedar Akib. 2010. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN : Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. I/I.

Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**POLICY IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE REVENUE
AND EXPENDITURE MANAGEMENT POLICY (APBDes) IN
LEBBA'E VILLAGE, AJANGALE DISTRICT, BONE DISTRICT**

Andi Desi, Andi Aslinda, Risma Niswaty

Makassar public university
Email: Andidesi4@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Village Income and Expenditure Budget Management Policy (APBDesa) in Lebba'e Village, Ajangale District, Bone Regency. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The data collection technique was done by observing, interviewing and documenting. Data validation techniques. The data analysis techniques used consisted of data condensation, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of this study indicate that the implementation of the Village Budget and Income Expenditure Management Policy (APBDesa) in Lebba'e Village, Ajangale District, Bone Regency has not been implemented optimally. In view of 1) the content of the policy a) the influencing interests have not had a significant and good influence; b) the types of benefits have not been fully realized; c) the degree of change to be achieved has not been fully fulfilled and is not evenly distributed in terms of development and other matters; d) the location of the decision making taken by the village leadership is good but the implementers of the implementation are not running it well; e) program implementers do not optimally implement policies from superiors; f) the resources used are still insufficient and need to be addressed 2) The policy environment a) the powers, interests and strategies of the actors involved in implementing the policy by establishing good communication; b) characteristics of institutions and regimes in power using a kinship system that has positive and negative values; c) the level of compliance and the response from the implementer has not run optimally and is still not obedient to the decisions made.

Keywords: Policy Implementation, Budget Management.

PRELIMINARY

The Republic of Indonesia in the New Order era adhered to the principle of centralization, namely that all development and government authority occurred at the central level, thus government affairs and development in the New Order era occurred at the central level or the capital city of the country, but over time and the collapse of the New Order regime. which is led by president Soeharto, the Republic of Indonesia has slowly begun to leave this centralized system, and on January 1, 2001, the government of the Republic of Indonesia officially declared the commencement of the implementation of regional autonomy.

Since then, the government and regions throughout the archipelago have entered a new phase, namely regional autonomy and fiscal decentralization.¹ With the issuance of these laws and regulations, the old regional government and development system which embraced the hope of centralization with the central government was officially abandoned.

The application of regional autonomy requires the support and development of a management and development system that encourages wider community involvement. Meanwhile, in the government structure, it is necessary to develop an honest, open, responsible and democratic government behavior (good governance). Meanwhile, in the social order, a mechanism must be developed that provides opportunities for citizen participation in the policy-making process.

In Law Number 6 of 2014 concerning villages, it is a reflection that provides a basis based on the principles of decentralization and regional autonomy and provides an acknowledgment of genuine autonomy to the village. The village is the most concrete form of the nation, shown by high diversity and different and relatively independent customs and traditions. With the existence of village autonomy, the regulation of the village government has experienced a major paradigm shift in terms of authority. The central and local governments no longer intervene directly but provide guidance, guidance, training / learning including village regulations as well as village revenue and expenditure budgets (APBDes).

The village income and expenditure budget (APBDes) is a village regulation that contains the sources of revenue and the allocation of village expenditures within a period of one year. The village income and expenditure budget (APBDes) consists of village income, village expenditure and financing. The draft village income and expenditure budget (APBDes) is discussed in the village development planning deliberations. The village head together with the village consultative body (BPD) determine the annual village income and expenditure budget (APBDes) with village regulations, and it is compiled to find out how much village income and expenditure is for the progress and development of the village as well as the village expenditure itself.

In the principle of the explanation above, it is clear that regional autonomy provides opportunities for community development at the lowest level, namely the village for equitable development, and opens opportunities for improving economic activities in the community, including at the village level. Referring to current conditions, the implementation of regional autonomy, especially at the village level, is still far from expectations, there are still many irregularities that occur in various fields, one of which is the implementation of the village income and expenditure budget (APBDes) policy, which in practice often finds many problems, namely the absence of found in village businesses such as livestock, sewing, ornamental plant cultivation, as well as businesses that exploit the potential of other villagers, lack of good management of village wealth,

The success of a policy is determined by many factors and each of these factors is related to one another. Based on the problems found, this study uses the Merilee S. Grindle implementation model as a reference and basis for comparing whether the implementation of village income and expenditure budget (APBDes) management policies in Lebba'e Village, Ajangale District, Bone Regency is in accordance with Regent Regulation Number 15 of 2015. Merilee S. Grindle policy implementation model where the measurement of the success of policy implementation is seen from the process, by questioning whether the implementation of the policy is in accordance with what is determined (design) by referring to the policy action

RESEARCH METHODS

This research uses a qualitative approach, a qualitative approach is descriptive analytic. The data obtained such as the results of observations, the results of interviews, the results of shooting and field data were compiled by researchers at the location and the researchers explored and photographed the social situation that was studied thoroughly, broadly and deeply. The researcher analyzed the data and enriched the information and compared it with the original data and presented it in the form narrative descriptions, in the form of respondents' stories from interviews and social backgrounds regarding the implementation of village revenue and expenditure budget management policies (APBDes) in Lebba'e Village, Ajangale District, Bone Regency based on facts that occur in the field

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. Presentation of Research Data

Based on the regulations regarding the implementation of the village income and expenditure budget policies in bone district regulated in the bone regent regulation no 15 of 2015 in article 12 paragraph 1 concerning the

classification of Village Expenditures as referred to in article 8 paragraph (1) letter b consists of groups

- a. Village government administration;
- b. Implementation of Village development;
- c. Village community development;
- d. Village Community Empowerment; and
- e. Unexpected shopping 25

In 2015, the income of Lebba'e Village was worth a total of Rp. 479,779,600.00. and Lebba'e Village expenditure totaling 479,879,600.00 with a surplus / deficit of IDR 100,000 divided into village government administration worth IDR 170,779,600.00. village development sector worth Rp. 292,600,000.00. in the field of community development Rp. 3,000,000, in the field of community empowerment 13,500,000. Meanwhile, the income for Lebba'e Village comes from village funds worth 94,519,900.00. Part of the proceeds from local taxes and levies of Rp 19,440,900. Village fund allocation of Rp. 315,718,800.00. Financial assistance of Rp. 50,000,000. and district financial assistance of Rp. 50,000,000 and other income Rp. 100,000.00.²⁶ So it can be concluded that in 2015 the source of income for Lebba'e Village came from the Village Fund, district taxes and retribution and village fund allocation.

In 2016 the income of Lebba'e Village was worth a total of Rp. 966,743,000.00 and village expenditure also worth Rp. 966,743,000.00 divided into the field of village government administration valued at IDR 302,071,000.00. Village development sector 561,061,000.00. the field of community development Rp. 46,611,000.00. community empowerment sector Rp. 10,000,000. and a surplus / deficit of Rp. 47,000,000. while the income for Lebba'e Village comes from the Village Fund of Rp. 598,061,000.00. Part of the district's local taxes and levies amounting to Rp. 18,411.00.00. Allocation of village funds 350,271,000.00. ²⁷ So it can be concluded that in 2016 the source of income for Desa Lebba'e came from village funds, district taxes and retribution as well as the allocation of village funds. The process of implementing the village income and expenditure budget management policy (APBDes) in Lebba'e Village, Ajangale District, Bone Regency is based on the results of interviews and data and observations of researchers in the management implementation process into 4 parts, namely: Village government administration, such as intensive village head, hamlet, faith Koran teachers and intensive posyandu, as well as salaries for civil servants. The implementation of village development, such as the development of village infrastructure, village offices along with internal inventories to facilitate services to the community, construction of farm roads and irrigation of rice fields to make it easier for farmers to access roads to their rice fields, as well as in the health sector, construction of toilets and trash bins. Village community development, namely socialization about crime, the dangers of drugs, and counseling about the law.

2. Discussion

Implementation of village revenue and expenditure budget management policies (APBDes) in Lebba'e Village, arenaale sub-district, bone district, namely the implementation process by dividing it into 4 parts, namely Village government implementation, Village development implementation, Village community development, Village Community Empowerment. The source of the revenue budget in Lebba'e Village comes from the Village Fund, district taxes and fees as well as the allocation of village funds, financial assistance, district financial assistance and other income.

The process of implementing the village revenue and expenditure budget management policy (APBDes) in Lebba'e Village, Ajangale District, Bone Regency is in accordance with the rules set by Bone Regency. but in the implementation of the policy implementation is not fully implemented or can be said that it is not carried out effectively. This is caused by several factors in accordance with Merilee S. Grindle's theory, namely, program implementers are still not obedient so that the program is only made as a program that is not properly implemented, the resources used are still lacking, both from science and technology knowledge and work ethic, and the level of Compliance with the level of compliance is still lacking from the village apparatus, and the response from the implementers is still lacking, especially the response from the community who accepts the policy which is still lacking.

The success of a policy implementation cannot be separated from the local government apparatus and also from the community as the recipient of the policy. All public policies are intended to influence and monitor human behavior. If policy cannot be fulfilled, if people act in an unwanted way, then the policy can be said to be ineffective, according to Merilee's theory. S. Grindle.

A. Content of policy (Policy Contents)

a. Interest affected (influencing interests)

The implementation of the management of the village income and expenditure budget policy in Lebba'e Village is seen from the interests that influence it still does not have a significant and good effect, the problem is seen from the interests that affect not totally and are active in managing the village income and expenditure budget in Lebba'e Village. , the involvement of these interests is only a formality.

b. Type Of Benefits (benefit type)

Based on the results of interviews and observations of researchers, the types of benefits of the village income and expenditure budget management policy in Lebba'e Village are in the field of village development, especially in the agricultural sector, namely the construction of farm roads and irrigation of rice fields which are very helpful for farmers, construction of village offices and completeness of inventories. other villages that are useful for simplifying services, providing toilets and also procuring trash bins in the health sector.

However, the construction of the main road is financed by the provincial budget.

However, in the field there are still many agricultural lands of residents that do not have irrigation, and agricultural land does not have farming roads, and in Lebba'e Village there is no posyandu and also a puskesmas which is far from worthy of being called a health center. As well as poskamling which is still not feasible to function

c. *Extent of change envision* (Degree of Change to be achieved)

From the results of the interview the researcher said from the village apparatus and community leaders in Lebba'e Village that the degree of change achieved was that in the past, Lebba'e Village did not have a village office, now with this regent's regulation on managing the village income and expenditure budget, in Lebba'e Village already has a village office, as well as village assets in it.

In fact, the degree of change has not been optimally fulfilled, one example is village data that has not been realized at all. also the establishment of BUMDES that has not been implemented until now, as well as the village infrastructure which the author has observed has not been fully fulfilled or complete.

d. *Site of Decision Making* (the location of the decision)

The location of decision making on the implementation of village income and expenditure budget management in Lebba'e Village is related to decisions made by stakeholders, coordination from the village head to his subordinates. The location of decision making cannot be separated from the role of the Lebba'e village head who coordinates with his subordinates in formulating and managing the village income and expenditure budget in Lebba'e Village.

e. *Implementer Program* (program implementer)

Implementing programs and programs for managing the village expenditure budget in Lebba'e village are well programmed and structured, namely the village government implementation program, development programs, community empowerment and coaching, but the problem is that at the time of implementation the program implementers are still lacking and even just a formal program is not implemented in the community at all.

f. *Resources Committed* (resources used)

Merilee S. Grindle's theory explains that the implementation of a policy must also be supported by the resources used so that its implementation runs well.²⁸ In managing the village income and expenditure budget policies in Lebba'e Village, the resources used from a scientific perspective are high school and undergraduate graduates. . based on the results of interviews and observations from researchers that one of the obstacles that is not properly implemented is the policy of managing the village income and expenditure budget in Lebba'e village, is in terms of human resource capabilities, both from

a scientific perspective, the level of mastery of technology is still lacking and also ethos. and morale is very lacking, so that in the future the local village government must be able to improve in terms of its own human resources.

B. Context of Policy (Policy Environment)

a. *Power, interest, and Strategy of Involved Actor* (powers, interests and strategies of the actors involved)

The strategy used in managing budget policies and village expenditure income is to establish communication from all village officials involved, both the community who are also the implementers and recipients of the policy. Researcher's observations, the strategy used by the Lebba'e village government by establishing intense communication with each village apparatus and that, supporting the implementation of the village revenue and expenditure budget policy is already very good, but as said by the chairman of the Lebba'e Village BPD the problem is the community who lack curiosity and feel stupid.

b. *The substitution and regime characteristic* (Characteristics of ruling institutions and regimes)

The characteristic of the Lebba'e village government in managing the village income and expenditure budget policies is to choose a tool or policy maker based on the kinship system, from the positive side, communication and policies are well supported. But it has a negative side, namely that sometimes the elected village apparatus do not comply with these regulations because village officials and officials have family relationships, the feeling of being reluctant and obedient to implement the policy is still lacking.

c. *Compliance and Responsivense* (the level of compliance and the response from the implementer

In Merilee S. Grindle's theory, another important thing in the process of implementing a policy is compliance and response from the implementers,

²⁹In implementing the management of the village income and expenditure budget in Lebba'e Village, the level of compliance and response from the implementers is still lacking, as evidenced by the lack of compliance from the implementers is the accountability report of the village income and expenditure budget in Lebba'e village in the last 2 years that has not leave it to the head of the BPD, and also the response from the community who is expected to be critical and willing to participate in the village income and expenditure budget management program in Lebba'e Village, namely BUMDES which was betuk last year until now not yet running.

CONCLUSION

The implementation of the Village Budget and Income Expenditure Management Policy (APBDesa) in Lebba'e Village, Ajangale District, Bone Regency has not been implemented optimally. In view of 1) the content of the policy a) the influencing interests have not had a significant and good

influence; b) the types of benefits have not been fully realized; c) the degree of change to be achieved has not been fully fulfilled and is not evenly distributed in terms of development and other matters; d) the location of the decision making taken by the village leadership is good but the implementers of the implementation are not running it well; e) program implementers do not optimally implement policies from superiors; f) the resources used are still insufficient and need to be addressed 2) Policy environment a) power, interests, and the strategies of the actors involved in implementing policies by establishing good communication; b) characteristics of institutions and regimes in power using a kinship system that has positive and negative values; c) the level of compliance and the response from the implementer has not run optimally and is still not obedient to the decisions made.

Bibliography

- Agustino, Leo. 2014. Basics of public policy. 5th printing. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anonymous. 2015. Thesis Writing Guidelines. State University of Makassar.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2014. State Administration Ethics. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2014 Understanding Governmental Science a study of the theory of concepts and *development*. 7th printing. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2014. Public Policy Analysis A Practical Guide to Assessing Social Issues and Policies. 7th printing. Bandung: CV, Alfabeta
- Sjafrizal. 2014. Regional Development Planning in the Autonomy Era. 1st printing. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solichin Abdul Wahab, Hajj. 2016. Policy analysis: from formulation to drafting *policy implementation models public*. 4th edition. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono.2016. Quantitative, qualitative, and R&D research methods. 23rd printing. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2015. Public Policy & Transparency of Local Government Administration. 2nd printing. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wijaya, HAW. 2014. Village Autonomy is Original, Round and Whole Autonomy. 7th printing. Jakarta: Rajawali Press.
- Haedar Akib. 2010. POLICY IMPLEMENTATION: What, Why and How. Journal of Public Administration. I / I.
- Bone Regent Regulation Number 15 of 2015 concerning breastfeeding

guidelines village income and expenditure budget
Law Number 6 of 2014 concerning Villages